

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Stakeholder (Stakeholder Theory)

Teori stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik modal, tetapi juga kepada seluruh pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, seperti investor, kreditor, karyawan, pemerintah, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Perusahaan perlu menjaga hubungan yang baik dengan stakeholder melalui transparansi informasi dan tanggung jawab sosial perusahaan. Salah satu bentuk transparansi tersebut adalah melalui pengungkapan *sustainability report* yang memuat informasi ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan. Dengan adanya *sustainability report*, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan stakeholder serta mempertahankan keberlangsungan usaha perusahaan.

Teori Stakeholder dipopulerkan oleh digunakan sebagai mana perangkat manajerial, teori ini menjelaskan bahwasannya perusahaan tidak semata-mata memenuhi kepentingan dan perusahaan dalam memaksimalkan profit, tetapi perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan dari para *stakeholders* melalui pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola (Freeman & McVea, 2005).

2.1.2. Financial Distress

Financial distress adalah situasi ketika perusahaan berada dalam kondisi kesulitan keuangan sehingga membuat perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Penelitian (Shi et al., 2023) menjelaskan bahwa *financial distress* merupakan risiko kesulitan keuangan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha perusahaan. Kondisi tersebut ditandai dengan penurunan kinerja keuangan, ketidakstabilan arus kas, meningkatnya beban utang, serta menurunnya kemampuan perusahaan dalam mempertahankan stabilitas operasional. *Financial distress* dapat menjadi tahap awal sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan apabila perusahaan tidak mampu memperbaiki kondisi keuangannya.

2.1.3. Sustainability Report

Laporan Keberlanjutan memuat informasi tentang aktivitas perusahaan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada stakeholder. *Sustainability report* biasanya disusun berdasarkan standar *Global Reporting Initiative* (GRI). Penelitian (Siti Nurhayati, 2025) menjelaskan bahwa *sustainability reporting* memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan. Pengungkapan *sustainability report* yang baik dapat membantu perusahaan membangun citra positif serta mendukung keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. *Sustainability report* juga digunakan perusahaan sebagai sarana untuk menunjukkan komitmen terhadap praktik bisnis berkelanjutan dan menjaga hubungan baik dengan investor, kreditor, maupun masyarakat.

Penerapan pelaporan keberlanjutan di Indonesia dipandu oleh standar nasional dan internasional terbaru:

- a. Standar GRI (GRI 2: Landasan 2021): Standar GRI merupakan acuan dalam menyusun laporan keberlanjutan, yang membantu organisasi mengungkapkan berbagai dampak penting dari aktivitasnya terhadap aspek ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Pengungkapan tersebut juga mencakup dampak yang berkaitan dengan hak asasi manusia serta informasi mengenai langkah-langkah yang dilakukan organisasi dalam mengelola dan menangani dampak tersebut.

Tabel 2. 1. GRI 2 Pengungkapan Umum 2021

Kode GRI	Isi pengungkapan
GRI 101-1	Komitmen dan kebijakan organisasi untuk menghentikan serta membalikkan hilangnya keanekaragaman hayati, mencakup ruang lingkup kebijakan, tujuan, target, garis dasar, dan indikatornya.
GRI 101-2	Cara organisasi mengelola dampaknya terhadap keanekaragaman hayati: urutan mitigasi (menghindari, meminimalkan, memulihkan, mengimbangi), tindakan konservasi, luas area yang direstorasi, praktik offset, rencana pengelolaan, keterkaitan dengan iklim, dan dampak bagi pemangku kepentingan.
GRI 101-3	Kepatuhan dan langkah sukarela organisasi terkait akses serta pembagian manfaat sumber daya hayati (Access and Benefit-Sharing).
GRI 101-4	Penetapan dampak yang dianggap signifikan terhadap keanekaragaman hayati.
GRI 101-5	Letak dan luas lokasi operasi, keberadaan area sensitif (bernilai hayati, rentan integritas ekosistemnya, cepat menurun, berisiko air, atau penyedia jasa ekosistem), kegiatan di lokasi, serta produk atau jasa dalam rantai pasok.
GRI 101-6	Penyebab langsung hilangnya keanekaragaman hayati: alih fungsi ekosistem, pemanenan spesies liar, penggunaan air, polusi, spesies asing invasif, dan rantai pasok, beserta data konteksnya.
GRI 101-7	Perubahan keadaan keanekaragaman hayati, yaitu jenis, ukuran, dan kondisi ekosistem pada tahun dasar maupun sesudahnya, ditambah informasi konteks.
GRI 101-8	Jasa ekosistem yang dimanfaatkan, pihak penerima manfaatnya, dan dampak kegiatan organisasi terhadap jasa tersebut.
GRI 102-1	Rencana transisi mitigasi perubahan iklim: kebijakan dan tindakan, kesesuaian dengan batas 1,5°C, anggaran, tata kelola, keterpaduan dengan strategi bisnis, target pengurangan emisi dan

Kode GRI	Isi pengungkapan
	penghentian bahan bakar fosil, transisi berkeadilan, dampak bagi pekerja, komunitas, dan biodiversitas, serta sikap kebijakan publik dan lobi.
GRI 102-2	Rencana adaptasi perubahan iklim: risiko dan peluang, kebijakan dan tindakan, skenario, anggaran, tata kelola, target dan kemajuan, serta dampaknya bagi manusia dan biodiversitas.
GRI 102-3	Dampak transisi terhadap tenaga kerja: perekrutan, pemutusan hubungan kerja, penempatan ulang, dan peningkatan keterampilan (dirinci menurut jenis kelamin dan tipe), kondisi pekerja non-karyawan, upah dan biaya hidup, lokasi terdampak, serta kesepakatan dengan komunitas dan Masyarakat Adat.
GRI 102-4	Target pengurangan emisi GRK dan perkembangannya: cakupan gas dan biogenik CO ₂ , metode Scope 2 dan 3, keselarasan ilmiah, kebijakan revisi target, tahun dasar, perhitungan ulang, kemajuan, dan metodologi.
GRI 102-5 s.d. 102-7	Emisi GRK Scope 1, 2, dan 3: jumlah kotor, rincian per gas, CO ₂ biogenik, tahun dasar beserta alasannya, emisi tahun dasar, konteks perhitungan ulang, pendekatan konsolidasi, dan metodologi.
GRI 102-8	Rasio intensitas emisi GRK dan cakupan emisi yang dihitung.
GRI 102-9	Penghapusan GRK dalam rantai nilai: jumlah removals, risiko ketidakpermanenan, tujuan, dampak bagi manusia dan biodiversitas, serta metodologinya.
GRI 102-10	Kredit karbon yang dibatalkan: identitas dan jenis proyek, registri, kualitas kredit (kelengkapan, estimasi emisi, kepastian, pencegahan kebocoran, verifikasi independen), tujuan pembatalan, serta dampak sosial dan lingkungan proyek.
GRI 103-1	Kebijakan dan komitmen energi, dampak konsumsi energi, serta konsumsi bahan bakar.
GRI 103-2	Konsumsi energi dan pembangkitan energi sendiri di dalam organisasi: bahan bakar, energi yang dibeli, energi terbarukan produksi sendiri, energi yang dijual, instrumen kontraktual, serta metodologi dan faktor konversi.
GRI 103-3	Konsumsi energi di hulu dan hilir rantai nilai beserta metode perhitungannya.
GRI 103-4	Rasio intensitas energi, cakupan, dan jenis energi yang dihitung.

Kode GRI	Isi pengungkapan
GRI 103-5	Penurunan konsumsi energi: besaran penghematan, sumbernya (inisiatif efisiensi atau faktor lain), jenis energi, lokasi dalam rantai nilai, metode pengukuran, tahun dasar, dan alat hitung.
GRI 201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan (EVG&D): dirinci menurut cakupan wilayah bila material, dan bersumber dari laporan keuangan atau laba rugi yang diaudit maupun catatan manajemen yang telah diperiksa internal.
GRI 201-2	Dampak keuangan, risiko, dan peluang akibat perubahan iklim: jenis risiko atau peluang, konsekuensinya, perkiraan efek keuangan sebelum penanganan, cara penanganan, serta biayanya.
GRI 201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program lainnya: perkiraan nilai kewajiban, dana khusus yang tersedia, dasar dan waktu perhitungan, strategi bila pendanaan belum penuh, besaran iuran pemberi kerja dan karyawan, serta tingkat kepesertaan.
GRI 201-4	Bantuan keuangan dari pemerintah: nilai yang diterima, rincian per negara, dan sejauh mana pemerintah memegang saham.
GRI 202-1	Perbandingan upah awal karyawan (menurut jenis kelamin) dengan upah minimum setempat, termasuk kondisi pekerja non-karyawan, variasi upah minimum, dan definisi lokasi operasi signifikan.
GRI 202-2	Persentase manajer senior di lokasi operasi utama yang berasal dari warga lokal, beserta definisi 'manajemen senior', 'lokal', dan 'lokasi operasi signifikan'.
GRI 203-1	Investasi infrastruktur dan layanan pendukung: tingkat realisasi, dampak positif maupun negatif bagi masyarakat dan ekonomi lokal, serta sifat investasinya (komersial, natura, atau pro bono).
GRI 203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan dan penilaiannya terhadap tolok ukur eksternal, prioritas pemangku kepentingan, standar, protokol, dan agenda kebijakan.
GRI 204-1	Persentase anggaran pengadaan di lokasi operasi utama yang dibelanjakan pada pemasok lokal, ditambah batasan wilayah 'lokal' dan definisi lokasi operasi penting.
GRI 206-1	Perkara hukum terkait praktik antipersaingan, antimonopoli, dan monopoli (berjalan maupun selesai), serta hasil utama putusannya.
GRI 301-1 s.d.301-3	Material: total berat atau volume bahan produksi dan kemasan; persentase bahan daur ulang yang dipakai; serta persentase produk dan kemasan yang diambil kembali, beserta cara pengumpulan datanya.

Kode GRI	Isi pengungkapan
GRI 302-1 s.d. 302-5	Energi: konsumsi di dalam organisasi (bahan bakar, listrik, pemanasan, pendinginan, uap), konsumsi di luar organisasi, intensitas energi, pengurangan konsumsi, dan pengurangan kebutuhan energi produk dan jasa, masing-masing dengan standar, metode, asumsi, serta faktor konversinya.
GRI 303-1 s.d.303-5	Air dan efluen: interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama; pengelolaan dampak pembuangan (standar minimum dan zat prioritas); total pengambilan air per sumber; total pembuangan air per tujuan dan kualitas; serta konsumsi air dan perubahan penyimpanan, termasuk wilayah dengan langka air.
GRI 304-1 s.d. 304-4	Keanekaragaman hayati: lokasi operasi di dekat kawasan lindung; dampak signifikan aktivitas, produk, dan jasa; habitat yang dilindungi atau dipulihkan; serta jumlah spesies Daftar Merah IUCN dan daftar nasional menurut tingkat risiko kepunahan.
GRI 305-1 s.d. 305-7	Emisi: GRK langsung (Cakupan 1), tidak langsung dari energi (Cakupan 2), dan tidak langsung lainnya (Cakupan 3); intensitas; pengurangan; zat perusak ozon; serta NOx, SOx, dan emisi udara signifikan lain, masing-masing dengan gas, tahun dasar, faktor emisi, dan metodologi.
GRI 306-1 s.d. 306-5	Limbah: timbulan dan dampak signifikan, pengelolaannya (termasuk oleh pihak ketiga), total berat limbah yang dihasilkan, yang dialihkan dari pembuangan, dan yang diarahkan ke pembuangan, dengan rincian berbahaya/tidak berbahaya dan jenis operasinya.
GRI 308-1 dan 308-2	Penilaian lingkungan pemasok: persentase pemasok baru yang diseleksi dengan kriteria lingkungan; jumlah pemasok yang dinilai dan teridentifikasi berdampak negatif signifikan; serta persentase yang diperbaiki atau diputus kerja samanya.

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026.

- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017, menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan bertugas untuk membentuk suatu pengawasan dan pengelolaan sistem untuk seluruh kegiatan di sektor keuangan. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kekuasaan dan wewenang penuh untuk menerapkan keuangan berkelanjutan di Indonesia. Tujuan dari penerapan Keuangan Keberlanjutan adalah untuk meningkatkan daya saing Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik melalui pengembangan layanan keuangan berkelanjutan. Ini diharapkan dapat menstabilkan sistem sambil mengatasi isu kesenjangan sosial, melestarikan lingkungan, dan mendorong efisiensi sumber daya. (OJK, 2020).

Tabel 2. 2. Pengungkapan Index POJK No.51

No.	Keterangan	Aspek	Uraian
1.	Penjelasan strategi keberlanjutan	Sosial	Bagian ini berisi penjelasan mengenai strategi keberlanjutan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.
2.	Ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup	Lingkungan, Ekonomi, & Sosial	Diisi dengan perbandingan kinerja 3 (tiga) tahun terakhir (bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun) sebagai berikut: a. aspek ekonomi, paling sedikit meliputi: 1) kuantitas produksi atau jasa yang dijual; 2) pendapatan atau penjualan; 3) laba atau rugi bersih; 4) produk ramah lingkungan; dan 5) pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis Keuangan Berkelanjutan. b. aspek Lingkungan Hidup, paling sedikit meliputi: 1) penggunaan energi (antara lain listrik dan air); 2) pengurangan emisi yang dihasilkan (bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup); 3) pengurangan limbah dan efluen (limbah yang telah memasuki lingkungan) yang dihasilkan (bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup); atau 4) pelestarian keanekaragaman hayati (bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup). c. aspek sosial yang merupakan uraian mengenai dampak positif dan negatif dari penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi masyarakat dan

			lingkungan (termasuk orang, daerah, dan dana).
3.	Profil singkat LJK, Emiten dan Perusahaan Publik	Ekonomi & Sosial	Profil singkat menyajikan gambaran keseluruhan mengenai karakteristik LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a. visi, misi, dan nilai keberlanjutan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik; b. nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimil, alamat surat elektronik (e-mail), dan situs web LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik, serta kantor cabang dan/atau kantor perwakilan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik; c. skala usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik secara singkat, meliputi: 1) total aset atau kapitalisasi aset, dan total kewajiban (dalam jutaan rupiah); 2) jumlah karyawan yang dibagi menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan; 3) persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah); dan 4) wilayah operasional. d. penjelasan singkat mengenai produk, layanan, dan kegiatan usaha yang dijalankan; e. keanggotaan pada asosiasi; f. perubahan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang bersifat signifikan, antara lain terkait dengan penutupan atau pembukaan cabang, dan struktur kepemilikan.
4.	Penjelasan Direksi	Ekonomi	Penjelasan Direksi memuat: a. Kebijakan untuk merespon tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan, paling sedikit meliputi: 1) penjelasan nilai keberlanjutan bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik; 2) penjelasan respon LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik terhadap isu terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan;

			3) penjelasan komitmen pimpinan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam pencapaian penerapan Keuangan Berkelanjutan; 4) pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan; dan 5) tantangan pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan b. Penerapan Keuangan Berkelanjutan, paling sedikit meliputi: 1) pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan (ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup) dibandingkan dengan target; dan 2) penjelasan prestasi dan tantangan termasuk peristiwa penting selama periode pelaporan (bagi LJK yang diwajibkan membuat Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan). c. Strategi pencapaian target, paling sedikit meliputi: 1) pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup; 2) pemanfaatan peluang dan prospek usaha; dan 3) penjelasan situasi eksternal ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.
5.	Tata kelola keberlanjutan	Ekonomi	Tata kelola keberlanjutan memuat: a. Uraian mengenai tugas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan. b. Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang

			menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan. c. Penjelasan mengenai prosedur LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik. d. Penjelasan mengenai pemangku kepentingan yang meliputi: 1) keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan hasil penilaian (assessment) manajemen, RUPS, surat keputusan atau lainnya; dan 2) pendekatan yang digunakan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, antara lain dalam bentuk dialog, survei, dan seminar. e. Permasalahan yang dihadapi, perkembangan, dan pengaruh terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan.
6.	Kinerja keberlanjutan	Ekonomi, Lingkungan & Sosial	Kinerja keberlanjutan paling sedikit memuat: a. Penjelasan mengenai kegiatan membangun budaya keberlanjutan di internal LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik. b. Uraian mengenai kinerja ekonomi dalam 3 (tiga) tahun terakhir meliputi: 1) perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau investasi, pendapatan dan laba rugi dalam hal Laporan Keberlanjutan disusun secara terpisah dengan Laporan Tahunan; dan 2) perbandingan target dan kinerja portofolio, target

			pembiayaan, atau investasi pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan. c. Kinerja sosial dalam 3 (tiga) tahun terakhir: 1) Komitmen LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik untuk memberikan layanan atas produk dan/atau jasa yang setara kepada konsumen. 2) Ketenagakerjaan, paling sedikit memuat: a) pernyataan kesetaraan kesempatan bekerja dan ada atau tidaknya tenaga kerja paksa dan tenaga kerja anak; b) persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional; c) lingkungan bekerja yang layak dan aman; dan d) pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai. 3) Masyarakat, paling sedikit memuat: a) informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar termasuk literasi dan inklusi keuangan; b) mekanisme pengaduan masyarakat serta jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti; dan c) TJSL yang dapat dikaitkan dengan dukungan pada tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi jenis dan capaian kegiatan program pemberdayaan masyarakat. d. Kinerja Lingkungan Hidup bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: 1) biaya Lingkungan Hidup yang dikeluarkan; 2) uraian mengenai penggunaan material yang ramah
--	--	--	---

			lingkungan, misalnya penggunaan jenis material daur ulang; dan 3) uraian mengenai penggunaan energi, paling sedikit memuat a) jumlah dan intensitas energi yang digunakan; dan b) upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan sumber energi terbarukan; e. Kinerja Lingkungan Hidup bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup paling sedikit memuat: 1) kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf d; 2) informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap Lingkungan Hidup sekitar terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem 3) keanekaragaman hayati, paling sedikit memuat: a) dampak dari wilayah operasional yang dekat atau berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati; dan b) usaha konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukan, mencakup perlindungan spesies flora atau fauna; 4) emisi, paling sedikit memuat: a) jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya; dan b) upaya dan pencapaian pengurangan emisi yang dilakukan; 5) limbah dan efluen, paling sedikit memuat: a) jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenis;
--	--	--	---

			b) mekanisme pengelolaan limbah dan efluen; dan c) tumpahan yang terjadi (jika ada); dan 6) jumlah dan materi pengaduan Lingkungan Hidup yang diterima dan diselesaikan. f. Tanggung jawab pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan, paling sedikit memuat: 1) inovasi dan pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan; 2) jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan; 3) dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan dan proses distribusi, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif; 4) jumlah produk yang ditarik kembali dan alasannya; atau 5) survei kepuasan pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan.
7.	Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada		Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada
8.	Lembar umpan balik (<i>feedback</i>) untuk pembaca, jika ada		
9.	Tanggapan LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya		

Sumber : Diolah oleh penulis, 2026.

2.1.4. Pengukuran Pengungkapan Sustainability Report

Pengungkapan *Sustainability Report* merupakan sarana perusahaan untuk menyampaikan tanggung jawab ekonomi, sosial, dan lingkungannya kepada pemangku kepentingan, sekaligus menunjukkan komitmen terhadap praktik bisnis berkelanjutan dan keterbukaan dalam kegiatan operasionalnya. Penelitian ini mengukur pengungkapan tersebut dengan pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI), yang dipilih karena banyak dipakai perusahaan di berbagai negara dan memuat indikator pada tiga aspek, yakni ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Pengukuran pengungkapan laporan keberlanjutan bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh informasi keberlanjutan diungkapkan dalam laporan perusahaan serta seberapa tinggi tingkat keterbukaan dan kepedulian perusahaan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam penelitian ini, pengungkapan *sustainability report* diukur menggunakan *Sustainability Report Disclosure Index* (SRDI). Pengukuran dilakukan dengan metode *content analysis*, yaitu memberikan skor 0 apabila perusahaan tidak mengungkapkan sama sekali dan skor 1 ketika perusahaan mengungkapkan secara umum, dan skor 2 mengungkapkan Sebagian, serta di beri skor 3 apabila perusahaan mengungkapkan secara lengkap.

Publikasi laporan keberlanjutan dievaluasi melalui analisis konten yang menggunakan metode *Cosolidated Narrative Interrogation* (CONI). Metode yang diterapkan CONI untuk pengungkapan adalah sebagai berikut:

1. *Coding*: menggunakan daftar periksa (*checklist*) untuk menilai kelengkapan pengungkapan informasi ekonomi, lingkungan, dan social sesuai standar GRI. Pengungkapan yang tidak ada diberi skor 0, pengungkapan ada, tapi masih umum diberi skor 1, pengungkapan sudah mengacu pada indikator, tetapi belum lengkap diberi skor 2, pengungkapan mengacu pada indikator dan disampaikan secara lengkap diberi skor 3
2. *Scoring*: digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mengungkapkan informasi indeks kinerja ekonomi, lingkungan, dan social berdasarkan elemen-elemen yang ada dalam laporan keberlanjutan. *Scoring* dihitung dengan cara:

$$SRDI = \frac{\text{Jumlah item yang dipenuhi}}{\text{Jumlah skor item maksimum}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan tersebut kemudian dikelompokkan Berdasarkan level pengungkapan informasi setiap perusahaan, dengan kriteria sebagai berikut:

0%	: <i>Not applied</i>
1% - 40%	: <i>limited disclose</i>
41% - 75%	: <i>partially applied</i>
76% - 99%	: <i>well applied</i>
100%	: <i>fully applied</i>

Untuk menilai cakupan dan kedalaman informasi ekonomi, lingkungan, dan social, bagian ini menganalisis konten setiap situasi yang

dilaporkan perusahaan, lalu mengelompokkannya berdasarkan tiga level kualitas kedalaman.

Kualitas	Tipe	Deskripsi
<i>Low Quality</i>	1	Murni naratif
	2	Murni naratif dengan penjelasan yang spesifik
<i>Moerate Quality</i>	3	Murni Kuantitatif
<i>High Quality</i>	4	Kuatitatif dengan penjelasan yang kualitatif
	5	Komplek, berupa kualitatif, kuantitatif, dan komperasi

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2026

2.2. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang disajikan pada bagian berikut, sebagian besar studi menunjukkan adanya keterkaitan antara pengungkapan *sustainability report* dan kondisi *financial distress* perusahaan. Pengungkapan Laporan keberlanjutan yang dilakukan dengan baik bisa meningkatkan transparansi perusahaan sehingga berpotensi mengurangi risiko terjadinya kesulitan keuangan. Meskipun demikian, hasil penelitian yang ada belum sepenuhnya konsisten karena dapat dipengaruhi oleh karakteristik sektor industri, indikator yang digunakan untuk mengukur pengungkapan *sustainability report*, serta metode yang diterapkan dalam menilai financial distress. Atas dasar tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengungkapan sustainability report terhadap skor financial distress melalui pendekatan deskriptif eksploratori, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keterkaitan antara kedua variabel tersebut. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 2. 3. Penelitian Terdahulu

No.	Judul; Nama; Publikasi	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Saran Tindak Lanjut
1.	“Pengaruh Pengungkapan Laporan Keberlanjutan terhadap Kesulitan Keuangan dengan Kinerja Perusahaan sebagai Variabel Intervensi” (Dian Oktarina, 2018)	Menguji apakah laporan keberlanjutan memengaruhi kesulitan keuangan (<i>financial distress</i>) dengan kinerja perusahaan sebagai variabel perantara (<i>intervening</i>).	Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengungkapan sustainability report tidak semuanya berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> , hanya aspek tanggung jawab produk yang terbukti berpengaruh dan dapat menurunkan risiko kesulitan keuangan. Selain itu, kinerja perusahaan yang diukur dengan <i>Return on Assets</i> (ROA) juga berpengaruh negatif terhadap <i>financial distress</i> , yang berarti semakin baik kinerja perusahaan maka semakin kecil kemungkinan mengalami kesulitan keuangan. Namun, kinerja perusahaan tidak dapat menjadi perantara (<i>variabel intervening</i>) dalam hubungan antara sustainability report dan financial distress karena hasil pengujian tidak signifikan.	Menyarankan untuk membuat daftar kode terpisah yang digunakan sebagai referensi untuk penilaian laporan keberlanjutan sehingga justifikasi dapat diminimalkan.

2.	“Pengaruh good corporate governance dan financial distress terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan” (Nurma Puspitasari, Rida Prihatni, Muhammad Yusuf)	Mencari bukti empiris mengenai pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan (GCG), yang diwakili komite audit dan dewan komisaris, serta financial distress terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Sampelnya 120 observasi perusahaan manufaktur subsektor Consumer Goods di BEI tahun 2016-2018, dengan pengungkapan dihitung memakai indeks GRI G4 dan financial distress memakai Altman Z-Score modifikasi.	Pengungkapan laporan keberlanjutan tidak berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi, sehingga unsur dalam laporan tersebut belum mendorong penerapan akuntansi yang konservatif. Financial distress juga tidak terbukti memoderasi hubungan itu. Koefisien determinasi hanya 0,32%, jadi variasi konservatisme hampir seluruhnya dijelaskan oleh faktor di luar model. (Catatan: tujuan di atas membahas pengungkapan sebagai variabel terikat, sedangkan hasil membahas konservatisme. Cek kembali isi jurnal aslinya agar kolom tujuan dan hasil sinkron.)	Penelitian selanjutnya mencakup perluasan objek penelitian di luar subsektor <i>Consumer Good Industry</i> serta memperpanjang periode pengamatan agar hasil yang diperoleh lebih representatif. Mengingat hasil pengungkapan laporan keberlanjutan yang masih rendah—dengan rata-rata hanya 6 item yang diungkapkan—peneliti selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi variabel independen lain yang lebih kuat memengaruhi konservatisme, seperti struktur kepemilikan atau regulasi pemerintah yang lebih spesifik.
----	--	--	---	---

3.	Laporan tentang kesulitan keuangan dan keberlanjutan: perspektif dari industri makanan dan minuman (Widjaja & Yanti, 2025)	Untuk menguji pengaruh financial distress dan sustainability report terhadap return saham, khususnya pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta menilai pentingnya faktor tersebut dalam pengambilan keputusan investasi.	Report memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengungkapan sustainability report cenderung diikuti oleh penurunan return saham, sedangkan kondisi financial distress perusahaan tidak secara langsung memengaruhi return yang diperoleh investor.	Penelitian yang berbeda guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif.
4.	Dampak kesulitan keuangan, pengungkapan laporan keberlanjutan, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba di sektor perbankan Indonesia, Malaysia, dan Thailand. (Revy Karina, a and Yanuar Nanok Soenarno a)	Menganalisis pengaruh financial distress, pengungkapan sustainability report, dan ukuran perusahaan (firm size) terhadap praktik earnings management pada perusahaan perbankan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand selama periode 2019–2020. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi perbedaan pengaruh dari ketiga variabel tersebut di masing-masing negara, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi	Financial distress berpengaruh positif dan signifikan terhadap earnings management: makin berat kesulitan keuangan, makin besar dorongan manajemen mengatur laba demi memperbaiki citra di mata investor dan pemangku kepentingan. Adapun sustainability report tidak berpengaruh signifikan terhadap earnings management.	Periode amatan sebaiknya diperpanjang agar hasil lebih mewakili dan tidak hanya dipengaruhi situasi khusus seperti pandemi.

		praktik manajemen laba di sektor perbankan.		
5.	Dampak pelaporan keberlanjutan dan kinerja keuangan terhadap kesulitan keuangan: peran moderasi usia perusahaanSiti ("Nurhayati, Manahan P. Tampubolon, Prasadja Ricardianto, Endri")	Untuk menganalisis pengaruh <i>sustainability reporting</i> dan kinerja keuangan terhadap <i>financial distress</i> pada perusahaan, serta mengkaji peran usia perusahaan (<i>firm age</i>) sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya dengan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, khususnya pada sektor transportasi darat dan logistik di Indonesia, melalui pendekatan <i>Systematic Literature Review</i> (SLR).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>sustainability reporting</i> berperan dalam menurunkan risiko financial distress karena dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan pemangku kepentingan. Likuiditas juga terbukti berpengaruh negatif terhadap <i>financial distress</i> , yang berarti semakin baik kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek, maka semakin kecil risiko mengalami kesulitan keuangan. Sementara itu, <i>leverage</i> memiliki pengaruh yang bervariasi tergantung pada bagaimana perusahaan mengelola utangnya. Selain itu, usia perusahaan (<i>firm age</i>) terbukti memperkuat pengaruh <i>sustainability reporting</i> terhadap <i>financial distress</i> , di mana perusahaan yang lebih lama berdiri cenderung	Memperluas cakupan sampel dengan melibatkan lebih banyak sektor industri dan periode pengamatan yang lebih panjang agar hasil penelitian menjadi lebih representatif dan mampu menangkap dinamika kondisi ekonomi yang berbeda.
6.	Perusahaan yang Mengalami Kesulitan	Menganalisis hubungan antara pengungkapan sustainability	Menunjukkan bahwa pengungkapan sustainability	Memperluas cakupan variabel dengan

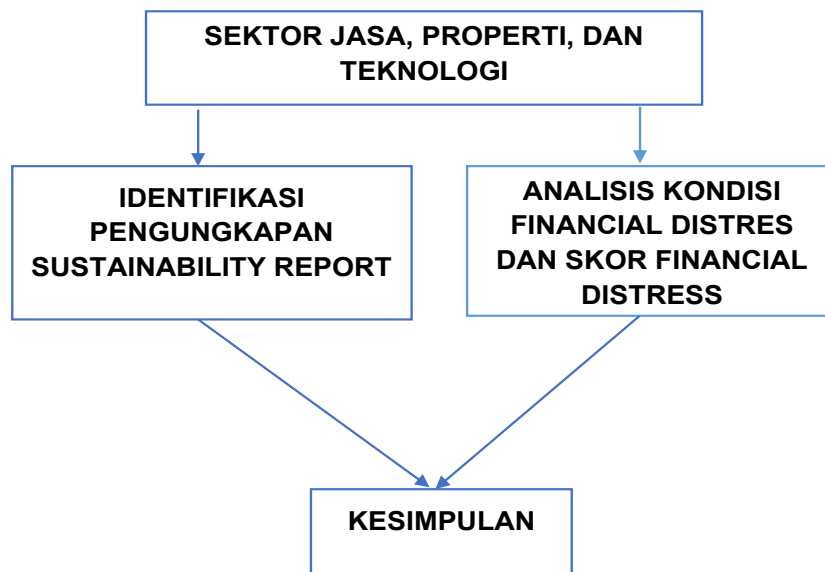
	Keuangan: Pelaporan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola di Indonesia (Iman Harymawan , Fajar Kristanto Gautama Putra , Bayu Arie Fianto and Wan Adibah Wan Ismail)	report (atau praktik tanggung jawab sosial perusahaan/CSR) dengan kondisi financial distress pada perusahaan. Secara khusus, penelitian ini ingin mengetahui apakah keterlibatan perusahaan dalam aktivitas keberlanjutan dapat memengaruhi tingkat risiko kesulitan keuangan serta kemungkinan terjadinya kebangkrutan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan pemahaman mengenai bagaimana praktik keberlanjutan dapat menjadi strategi dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan usaha perusahaan di tengah tekanan ekonomi.	report atau praktik CSR memiliki hubungan dengan kondisi financial distress perusahaan. Perusahaan yang lebih aktif dalam kegiatan keberlanjutan cenderung memiliki risiko financial distress yang lebih rendah, karena praktik tersebut dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, memperbaiki reputasi perusahaan, serta memperkuat kinerja jangka panjang. Namun demikian, dalam beberapa kondisi tertentu, terutama pada perusahaan yang sudah mengalami tekanan keuangan, aktivitas CSR dapat bersifat ambigu karena bisa digunakan sebagai sarana pencitraan (impression management), sehingga tidak selalu mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Oleh karena itu, hubungan antara sustainability report dan financial distress tidak selalu konsisten dan dapat dipengaruhi oleh	memasukkan faktor lain seperti corporate governance, ukuran perusahaan, dan kinerja keuangan untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.
--	--	--	---	--

			berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, tata kelola perusahaan, dan karakteristik industri.	
7.	Dampak keberlanjutan terhadap kesulitan keuangan di industri transportasi udara: efek moderasi dari Asia-Pasifik (Yin Shi1 , Xiaoni Li and Maher Asal)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pengungkapan Environmental, Social, and Governance (ESG) dengan risiko financial distress pada industri penerbangan global, serta menguji peran moderasi wilayah Asia-Pasifik (APAC) dalam hubungan tersebut. Penelitian menggunakan data ESG dan keuangan selama 11 tahun dari 23 maskapai penerbangan di dunia dengan pendekatan model two-way fixed effect untuk memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana praktik keberlanjutan memengaruhi stabilitas keuangan perusahaan.	Terdapat hubungan yang signifikan antara skor ESG dan kemungkinan terjadinya financial distress. Secara lebih rinci, aspek lingkungan (environmental) memiliki pengaruh positif terhadap risiko financial distress, sedangkan aspek sosial (social) justru memiliki pengaruh negatif yang dapat menurunkan risiko tersebut. Selain itu, ditemukan bahwa pengaruh ESG terhadap financial distress cenderung lebih lemah pada maskapai di kawasan APAC dibandingkan dengan wilayah lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi ESG dapat berkontribusi dalam meningkatkan stabilitas keuangan perusahaan	Menggunakan jumlah sampel yang lebih besar agar hasil penelitian lebih representatif, mengingat penelitian ini hanya menggunakan 23 perusahaan.
8	“Pengaruh Pengungkapan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengungkapan <i>Environmental, Social, and Governance</i> (ESG)	Pengungkapan ESG tidak berpengaruh signifikan terhadap asimetri informasi ($p = 0,7141 > 0,05$). Hal ini disebabkan oleh	Disarankan untuk memperpanjang rentang waktu penelitian agar dapat menangkap

	terhadap Nilai Perusahaan: Perspektif Informasi Asimetris pada Perusahaan Terdaftar di Indonesia” (Putri Angir; Weli)	memengaruhi nilai perusahaan (<i>firm value</i>) pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2021.	lamanya waktu yang dibutuhkan pasar untuk menyerap informasi ESG (<i>time lag</i>), serta adanya persepsi <i>greenwashing</i> atau kurangnya kredibilitas laporan keberlanjutan.	dampak regulasi SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 secara lebih optimal pasca masa tenggang penerapannya.
--	--	---	--	---

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026.

2.3. Kerangka Berpikir



Gambar 2. 1. Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026.

Kerangka berpikir ini memperlihatkan keterkaitan antara pengungkapan sustainability report dan kondisi keuangan pada perusahaan sektor jasa, properti, dan teknologi. Penelitian diawali dengan mengidentifikasi tingkat pengungkapan sustainability report perusahaan berdasarkan informasi keberlanjutan yang disajikan dalam laporan perusahaan. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap kondisi dan skor financial distress perusahaan dengan indikator tertentu, misalnya Altman Z-Score. Kedua aspek tersebut kemudian dianalisis untuk melihat kecenderungan hubungan antara tingkat pengungkapan sustainability report dengan kondisi kesulitan keuangan perusahaan. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai bagaimana pengungkapan sustainability report berkaitan dengan financial distress pada perusahaan sektor jasa, properti, dan teknologi.